

PIDATO UTAMA

Oleh Dr. Kuntoro Mangkusubroto

REDD+ di Indonesia: Menghijaukan Pembangunan Manusia

Rabu, 21 September 2011

Sahabat saya Bapak Menteri Erik Solheim,
Ibu Helen Clark,
Bapak Menteri Marty,
Sahabat saya Hans Brattskar,
Yang mulia,
Para tamu yang terhormat,
Para sahabat yang tersayang,

Selamat sore. Saya ingin berterimakasih kepada Pemerintah Norwegia dan Amerika Serikat atas dukungan mereka dalam menyelenggarakan acara ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada kalian semua atas kehadirannya. Banyak dari para hadirin di sini yang menunjukkan pengakuannya akan keseriusan peran hutan dalam mempengaruhi iklim kita. Permasalahan yang kita diskusikan hari ini merupakan hal yang kompleks dan mencakup berbagai aspek kehidupan.

Tahun lalu, kita bertemu disini dalam suatu acara yang sama, saya mengatakan bahwa tekad kita dalam mencapai tujuan seperti yang tertuang dalam Surat Niat (*Letter of Intent*) yang bersejarah antara Indonesia dan Norwegia. Saya berbagi dengan anda semua bahwa semangat dari kemitraan ini telah memberi kami kepercayaan diri bahwa target-target tersebut, meskipun kompleks dan sulit, bisa dicapai dan dukungan anda merupakan hal yang sangat penting.

Kami menjalin kemitraan dengan Norwegia untuk mendukung pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan kira-kira setahun yang lalu. Melihat ke belakang dari bereksperimen dengan REDD+, kita telah sampai pada suatu pemahaman bahwa REDD+, seperti yang secara sempit didefinisikan sebagai skema pembiayaan, tidak cukup untuk mencapai aspirasi pembangunan kita. Agar kita bisa sukses, REDD+ harus diletakkan pada konteks pertumbuhan berwawasan lingkungan. Hari ini saya di sini berbagi dengan anda mengenai versi saya tentang menghijaukan REDD.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu,

Perubahan terhadap suatu model pertumbuhan berwawasan lingkungan perlu didorong melalui suatu perubahan dalam paradigma pembangunan. Tujuan-tujuan REDD+ harus lebih jauh dari sekedar pengurangan deforestasi dan degradasi, tapi juga harus mencakup pertumbuhan yang berkesinambungan dan jalur-jalur alternatif menuju kesejahteraan bagi masyarakat yang paling terkena dampak dari program ini. Karenanya, kita memandang REDD+ sebagai suatu kesempatan untuk melakukan pembaruan pada institusi kita, membangun kapasitas, mengembangkan peraturan dan mempromosikan partisipasi publik. Partisipasi publik itu kita lakukan melalui penglibatan para pihak berkepentingan untuk memastikan bahwa agenda pembangunan kita benar-benar didorong oleh kebutuhan-kebutuhan rakyat, dan bahwa keuntungan-keuntungan yang dikumpulkan dari program-program ini dibagikan dan didistribusikan secara adil dengan komunitas-komunitas ini.

Tahun lalu, Satuan Tugas REDD+ di Indonesia telah bekerja keras untuk mengembangkan fondasi untuk mendirikan institusi-institusi baru dan mengidentifikasi prioritas-prioritas program. Sekarang waktunya telah datang bagi kita untuk memperluas keterlibatan kami. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjabarkan prioritas-prioritas kami.

Prioritas pertama adalah untuk menginstitutionalisasi Strategi REDD+ Nasional kami – yang baru saja selesai melalui 30 hari periode konsultasi publik minggu lalu. Elemen-elemen inti dari strategi tersebut akan diurus-utamakan ke dalam program-program di lembaga-lembaga yang relevan untuk memastikan perubahan-perubahan yang sesuai di dalam berbagai kebijakan dan praktek agar sekaligus disejajarkan dengan target-target REDD+.

Dalam usaha untuk memastikan pensejajaran antara strategi dan kebijakan, Presiden Yudhoyono mengesahkan suatu instruksi awal tahun ini untuk menunda penerbitan izin baru untuk hutan dan lahan gambut, yang secara umum dikenal sebagai moratorium. Moratorium selama dua tahun ini bertujuan untuk memberikan kami ruang bernafas untuk meningkatkan tata kelola hutan dan lahan gambut.

Terkait dengan moratorium, sekarang kami telah memiliki peta acuan yang diunggah di situs kami, ini merupakan pertama kalinya peta kehutanan dibuka untuk umum. Tujuannya adalah agar publik bisa memperbaiki peta-peta ini sesuai dengan kebutuhan.

Prioritas kedua adalah pendirian tiga institusi yang kami rasa sangat penting untuk kesuksesan implementasi:

Yang pertama adalah pendirian Lembaga REDD+ independen yang bertanggung-jawab langsung kepada Presiden. Lembaga REDD+ akan menjadi terobosan bagi status quo institusi pemerintah, memastikan koordinasi efektif antar berbagai kebijakan dan program di kementerian yang berbeda, dan beroperasi secara transparan dan inklusif.

Selanjutnya, kami akan mendirikan suatu instrumen pendanaan yang pada akhirnya akan memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengucurkan dana dari berbagai sumber termasuk sumber-sumber dari investasi swasta terhadap para penerima bantuan yang layak dari kegiatan-kegiatan terkait REDD+, seiring waktu memperkuat kepemilikan nasional, dan yang lebih penting lagi, melakukannya sambil mematuhi ketentuan pengamanan internasional.

Akhirnya, Presiden telah berkomitmen untuk memastikan bahwa implementasi REDD+ di Indonesia akan transparan dan akuntabel terhadap standar-standar internasional yang paling tinggi. Dalam semangat ini, kita berusaha mendirikan institusi MRV yang akan memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh para pelaku program untuk memastikan standar-standar tertinggi, yang sekaligus menyediakan kepercayaan diri bagi pemerintah dan donor akan dampak program-program ini melalui verifikasi independen.

Prioritas ketiga adalah menghasilkan data dan peta yang bisa diandalkan. Ada kebutuhan sangat penting untuk secara signifikan meningkatkan integritas data dan informasi kita untuk pembuatan keputusan yang kritis. Di Indonesia, setiap kementerian memiliki peta yang masing-masing berbeda, yang dikembangkan menggunakan kategorisasi yang berbeda. Untuk kegiatan lintas sektor seperti REDD+, ini sama sekali tidak membantu. Untuk memecahkan hal ini, Presiden sendiri telah menginstruksikan pembuatan *One Map* sebagai satu-satunya

acuan bagi seluruh kementerian dan institusi pemerintah. *One Map* akan menjadi dasar bagi pembuatan keputusan.

Akhirnya, program ini tidak akan lengkap tanpa dilaksanakannya implementasi awal melalui program-program percontohan. Selama tahun lalu, Kalimantan Tengah telah terpilih sebagai provinsi percontohan pertama untuk kegiatan-kegiatan REDD+. Baru minggu lalu, Gubernur Kalimantan Tengah dan saya menandatangani suatu Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) yang menguraikan serangkaian program yang kami harap sudah mulai dilaksanakan. Tujuan kami disini adalah untuk mendukung pemerintah Kalimantan Tengah dalam membuat pilihan-pilihan lokal mereka sendiri dan mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan lokal mereka, yang pada gilirannya akan konsisten dengan strategi kami yang berkembang. Program-program di Kalimantan Tengah meliputi pelaksanaan pemetaan dasar dan kampanye-kampanye peningkatan kesadaran publik, juga mempromosikan pembangunan ekonomi, termasuk berbagai proyek terkait peningkatan produktivitas di sektor pertanian.

Yang terhormat,

Meskipun tugas yang sekarang kami pegang merupakan tugas besar, kami telah mulai meletakkan berbagai sumber di balik visi kami untuk menghidupkan REDD+ di Indonesia. Presiden kami baru-baru ini telah menunjuk seorang Ketua baru untuk Satuan Tugas REDD+ yang akan bertanggung-jawab untuk mengkoordinasikan beberapa respon dari negara kami terhadap berbagai tantangan yang telah saya uraikan.

Satuan tugas ini merupakan reinkarnasi dari satuan tugas sebelumnya setelah berjalan melalui 6 bulan pertama tahun ini dan menghasilkan beberapa kemajuan penting. Satuan Tugas yang baru telah diperluas dan sekarang juga melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Pertanian. Selain itu, kerangka waktu kerjanya juga telah diperpanjang sehingga mencerminkan suatu kesempatan yang lebih realistis terkait adanya tantangan untuk melakukan reformasi institusional di Indonesia. Tahun lalu merupakan kesempatan kita untuk meletakkan kerangka konseptual dibalik berbagai prioritas seperti yang telah saya jelaskan. Sekarang merupakan saatnya bagi kami untuk mengerjakan perencanaan dan melakukan inisiatif implementasi di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah pusat hingga sampai ke provinsi dan kabupaten sebagai tempat dilakukannya berbagai implementasi tersebut.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu,

Kami menyadari bahwa kita telah membuat target yang sangat ambisius untuk diri kita sendiri. Kami mengawali suatu perjalanan melewati lautan yang belum pernah dilalui. Kami mencoba melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kami bereksperimen, berinovasi dan belajar sambil berjalan. Kami tahu kami mungkin tidak melakukannya dengan benar pada kali pertama. Selain itu, kami menyadari bahwa kami tidak bisa mencapai semua yang telah kita targetkan sendirian. Ketika Indonesia bertransisi ke tahapan implementasi yang berikutnya, dunia harus tetap bersatu dan sama-sama ingin bereksperimen dan menantang status quo untuk menyediakan dukungan lebih luas yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa pepohonan bisa tetap berdiri dan masyarakat diangkat keluar dari kemiskinan.

Pengalaman kami karenanya telah mengungkap dua pembelajaran penting. Yang pertama adalah kita harus mulai memandang pada pembiayaan REDD+ sebagai suatu mekanisme yang melampaui bantuan pembangunan asing atau ODA (*Overseas Development Assistance*). Interpertasi sempit terhadap protokol-protokol ODA membatasi cara penggunaan dana ini. Untuk memastikan efektivitas keseluruhan program, porsi signifikan dari dana awal yang dikucurkan perlu diinvestasikan untuk pengembangan kapasitas dan institusi, reformasi penguasaan lahan dan program-program sektoral seperti peningkatan produktivitas pertanian. Kegiatan tersebut akan memerlukan baik pendekatan atas-ke-bawah maupun bawah-ke-atas.

Pembelajaran kedua adalah mengenai peningkatan partisipasi sektor swasta dalam transformasi ini. Bahkan perkiraan yang paling optimistik mengenai persediaan dana untuk sektor publik terlalu sedikit dibandingkan pendanaan yang dibutuhkan untuk mengubah ekonomi kita menuju jalur yang lebih berkesinambungan. Kami harus menemukan berbagai cara agar dana sektor publik bisa digunakan untuk mengkatalisasi investasi-investasi sektor swasta ketimbang menggantikannya. Komunitas sektor swasta harus dilibatkan pada sektor per sektor dan komoditas per komoditas, mungkin melalui model seperti meja bundar komoditas (*commodity roundtables*) untuk memastikan bahwa standar-standar industri yang luas terkait kelestarian bisa dibentuk dan diadaptasikan.

Bapak-bapak dan ibu-ibu,

Indonesia berkomitmen untuk menyukseskan REDD+. Tidak hanya sebagai suatu inisiatif untuk memenuhi tujuan memerangi perubahan iklim atau menciptakan suatu komoditi baru, namun juga menggunakannya sebagai suatu kesempatan besar untuk membuat definisi ulang mengenai bagaimana kita membangun, diawali dari penggunaan lahan dan manajemen aset-aset alam, demi kepentingan umat manusia.

Namun kami tidak bisa melakukan hal ini sendirian. Kami membutuhkan dukungan dari komunitas internasional dan sektor swasta untuk bekerja sama dengan kami dalam mendefinisikan-ulang lansekap REDD+. Komitmen PBB dengan menciptakan kantor khusus untuk mendukung usaha keras kami di Indonesia merupakan sambutan yang sangat baik. Dengan dukungan internasional dari anda, kami bisa memastikan bahwa Indonesia akan mencontohkan model pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Kegagalan kita sebagai komunitas internasional dalam menangani permasalahan yang baru saja saya sebutkan akan, yang saya takutkan, melumpuhkan usaha-usaha kita untuk memformalkan dan menginstitutionalisasikan REDD+ dalam arsitektur perubahan iklim global. Karenanya saya ingin menggunakan kesempatan ini sebagai suatu seruan untuk bertindak – mari gunakan tahun yang akan datang ini sebagai kesempatan untuk bergerak lebih jauh dari retorika dan mulai mengimplementasikan program ambisius kita dengan segera dan secara meyakinkan untuk menciptakan REDD+ program yang benar-benar bisa bekerja.

Terimakasih.